



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CAHYO WIDI WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH I
3. NHK : 266238

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 661.288.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/125 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 257.752.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/100 m2 di PATI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 112 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 283.536.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.900.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOBIL, SUZUKI - SWIFT CITY CAR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 727.509.675**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.598.697.675

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.598.697.675

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.